

Peran Kolaboratif KPU Kabupaten Jombang Dan *Stakeholder* dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu 2024

Izzatul Lutfiyah¹, Khudrotun Nafisah², Abu Tazid³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Sosiatri, Fisipol, Universitas Darul Ulum

izzatul3361@gmail.com

Abstract

Elections are a means of achieving citizens' rights, namely in determining leaders at both the national and regional levels. This research began with an increase in the number of political participations in the 2024 election in Jombang Regency. Therefore, this research aims to find out the collaborative role of the Jombang Regency KPU and stakeholders in increasing political participation in the 2024 elections and how the Jombang Regency community responds to this role through qualitative descriptive research methods. This research uses Herbert Mead's theory of symbolic interactionism which explains the five stages of individual action, including: stimulus, impulse, perception, manipulation, and consumption. The results of this research are that the Jombang Regency KPU provides stimulus by carrying out face-to-face socialization and socialization via social media. On the other hand, the collaborative role of the Jombang KPU and stakeholders includes political parties, media, disability groups, Islamic boarding schools and the police. In response to this socialization, voters listened, understood and then considered their decisions in participating in politics so that the number of political participation in the 2024 elections in Jombang Regency was high.

Keywords : KPU; Stakeholders, Election of 2024; Political Participations

Abstrak

Pemilu merupakan sarana dalam mencapai hak warga negara yaitu dalam menentukan pemimpin baik ditingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini diawali dari adanya peningkatan jumlah partisipasi politik pada pemilu 2024 di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kolaboratif KPU Kabupaten Jombang dan *stakeholders* dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024 serta bagaimana respon masyarakat Kabupaten Jombang atas peran tersebut melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik milik Herbert Mead yang menjelaskan tentang lima tahapan tindakan individu antara lain: stimulus, impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumsi. Hasil dari penelitian ini adalah KPU Kabupaten Jombang memberikan stimulus atau rangsangan dengan melaksanakan sosialisasi tatap muka dan sosialisasi melalui media sosial. Di samping itu, peran kolaboratif KPU Jombang dan *stakeholders* antara lain dengan partai politik, media, kelompok disabilitas, pondok pesantren dan kepolisian. Respon atas sosialisasi tersebut, pemilih mendengarkan, memahami kemudian mempertimbangkan keputusannya dalam berpartisipasi politik sehingga angka partisipasi politik pada pemilu 2024 di Kabupaten Jombang tinggi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi pancasila dalam sistem pemerintahannya. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang”. Demokrasi sendiri merupakan sistem yang menggunakan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, negara dengan sistem demokrasi menggunakan pemilu sebagai syarat mutlak dalam mewujudkan kedaulatan rakyat (Langkun, Pinasang, and Jemmy 2023). Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu wujud demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan sarana dalam mencapai hak warga negara yaitu dalam menentukan pemimpin baik ditingkat nasional maupun daerah. Proses pemilihan umum sendiri menggunakan prinsip – prinsip pemilu yang langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Agung et al. 2023). Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pemilu yang dibentuk secara nasional, tetap dan mandiri (Sonianto and Minarni 2023). KPU mempunyai cakupan kerja berskala nasional yang berjenjang mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Mursyid and Larissa 2021)

KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu harus dapat bersikap transparansi dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku (Langkun et al. 2023). Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak hanya berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, namun juga harus berhubungan dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu (Yusuf 2010). Selain itu, KPU juga harus dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau *stakeholders* yang memiliki power dimasyarakat. Power tersebut akan mendorong dan membantu KPU untuk menciptakan sinergi antara berbagai kelompok yang berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu (Iswanto and Pamungkas 2024). Sinergitas yang dilaksanakan juga berbentuk banyak hal, seperti pada pemerintah daerah yang memberikan ruang pada KPU dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian yang memberikan keamanan selama berlangsungnya tahapan pemilu, serta berperan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu dalam mewujudkan hal tersebut KPU bersama *stakeholders* melakukan sosialisasi terkait kepemiluan dalam lingkup masyarakat (Sonianto and Minarni 2023). Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan banyak hal, mulai dari mengadakan event-event yang mengandung unsur pendidikan politik, sosialisasi terkait peraturan kepemiluan yang pada dasarnya harus diketahui oleh masyarakat, sosialisasi terkait hal – hal yang tidak boleh dilakukan ketika mencoblos nanti, dan sebagainya. Data DPT atau Daftar Pemilih Tetap, biasanya digunakan oleh KPU dalam menentukan target sosialisasi. Target sosialisasi tersebut dapat kita sebut sebagai pemilih pemula. Menurut UU Pemilu Bab IV pasal 198 ayat 1 pemilih pemula merupakan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah yang mempunyai hak memilih sebelumnya belum termasuk pemilih karena undang-undang pemilu. KPU Kabupaten Jombang menggunakan generasi Y dalam target sosialisasi yang dilakukan. Namun, jika melihat sosial media dan website KPU Jombang, KPU Jombang juga giat dalam mensosialisasikan pemilu pada generasi Zillennial dalam hal ini diantaranya siswa SMA/SMK dan mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa generasi Z menjadi generasi yang sangat dibutuhkan pemahamannya mengenai kepemiluan sehingga menguatkan independensi individu sebagai warga negara dalam menentukan hak pilihnya.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iswanto (2024) menjelaskan tentang analisis peran stakeholder melalui stakeholder mapping dalam upaya untuk mengidentifikasi strategi selama implementasi program/kebijakan berdasarkan sumber kekuatan stakeholder dengan pemetaan. Hal lain ditemukan oleh Tambun (2024) yang menjelaskan tentang bagaimana diseminasi informasi menjadi bagian penting KPU dan Bawaslu dalam memperkuat komunikasi sebagai upaya untuk memperkuat peran dan profesionalisme lembaga penyelenggara Pemilu 2024.

Adnyanaesa (2023) dengan penelitiannya berisi tentang penjelasan terkait peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa peran Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, namun yang menjadi hambatan adalah adanya perubahan struktur organisasi, kurang jelasnya bentuk lembaga, keterbatasan dana dan pola pikir generasi muda. Dari sudut pandang lain Dewi (2022) yang membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput.

Widiarto (2024) dalam penelitiannya menjelaskan tentang komunikasi politik dan pemilu 2024 sebagai upaya pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bima menuju pemilu yang bermartabat. Dwi (2024) yang berbeda tempat lokasi penelitian menjelaskan tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024. Dari sudut pandang lain Suwardyanba (2024) dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang peran media cetak dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024. Penelitian ini menghasilkan bahwa media cetak mempunyai potensi besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, mengedukasi masyarakat tentang proses demokrasi dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemilu.

Dari ketujuh jurnal yang dijadikan rujukan oleh peneliti, penelitian sebelumnya menjelaskan tentang peran dari masing-masing lembaga di suatu wilayah dalam melaksanakan pemilu. Peneliti menemukan penelitian yang menjelaskan tentang adanya peran *stakeholders* dan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024, namun penelitian tersebut dilaksanakan dengan metode studi literatur. Peneliti belum menemukan kecenderungan yang menjelaskan tentang peran *stakeholders* dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024. Berdasarkan obeservasi peneliti ditemukan bahwa tingkat partisipasi politik Kabupaten Jombang lebih rendah dibandingkan dengan dua kabupaten yang lain dalam satu dapil Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu adanya penelitian yang menjelaskan terkait peran *stakeholders* dan KPU Kabupaten Jombang dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024 di Kabupaten Jombang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Strause dan Corbin dikutip dari Syahrudin (2012) penelitian kualitatif merupakan prosedur penemuan data atau informasi yang dilakukan dengan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif dimana analisis data berupa kata - kata, gambar atau perilaku dengan melakukan gambaran dan wawancara mengenai situasi atau kondisi dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik milik Herbert Mead yang menjelaskan tentang lima tahapan tindakan individu antara lain: stimulus, impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumsi.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran KPU Jombang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Sosialisasi

Dalam persiapan pemilu 14 Februari 2024, KPU Kabupaten Jombang giat melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten sebagai upaya untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pemilu 2024. Sosialisasi tersebut menggunakan dua metode yaitu sosialisasi melalui media sosial dan tatap muka/langsung.

1. Sosialisasi Melalui Media Sosial

Dalam wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari KPU Jombang Rita Darmawati menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan salah satunya adalah melalui media sosial. Beliau menyampaikan bahwa media sosial sangat berperan pada kondisi saat ini, sehingga memaksimalkan adanya media digital juga penting dilakukan agar informasi dapat tersampaikan hingga pada masyarakat tingkat bawah. Selain itu, kendala yang dialami oleh KPU Jombang dalam pelaksanaan pemilu adalah kurangnya SDM, sehingga masifnya sosialisasi di media sosial menjadi salah satu alternatif dalam melaksanakan sosialisasi pemilu ke masyarakat. Berikut gambaran laman depan sosial media milik KPU Jombang:

-Instagram

Instagram lama KPU Jombang dengan nama pengguna @kpukabjombang, sementara *instagram* baru KPU Jombang dengan nama pengguna @kpu_jombang.

Gambar 1. Sosial Media Instagram KPU Jombang



- Tiktok

Sosial media *tiktok* KPU Jombang dengan nama pengguna @kpujombang

Gambar 2. Sosial Media Tiktok KPU Jombang



- Twitter

Sosial media *twitter* KPU Jombang dengan nama pengguna @kpukabjombang

Gambar 3. Sosial Media Twitter KPU Jombang



- Facebook

Sosial media Facebook dengan nama pengguna KPU Kab Jombang

Gambar 4. Sosial Media Facebook KPU Jombang



- Youtube

Sosial media youtube KPU Jombang dengan nama pengguna

Gambar 5. Sosial Media Youtube KPU Jombang



Selain media sosial di atas, KPU Jombang juga melaksanakan sosialisasi melalui metode percakapan langsung dengan masyarakat. Metode tersebut dilaksanakan via WhatsApp Center, dimana WhatsApp tersebut dioperasionalkan secara manual oleh jajaran komisioner bukan melalui robot. Metode ini menjadi salah satu langkah KPU Jombang dalam melaksanakan komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Dengan adanya WhatsApp center dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait kepemiluan terutama dalam mengatasi berita hoax. WhatsApp juga center menjadi media untuk mengkonfirmasi terkait kebenaran berita yang beredar.

2. Sosialisasi Dengan Metode Tatap Muka/Secara langsung

Menurut Anggota KPU Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM bahwa sosialisasi kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU jombang juga dilaksanakan secara tatap muka atau secara langsung. Sosialisasi tersebut melibatkan beberapa elemen penting dimasyarakat antara lain: seluruh DPT atau Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU, pemilih pemula, kelompok marginal kelompok minoritas seperti kelompok disabilitas dan kelompok perempuan. Daftar sosialisasi tatap muka yang telah dilaksanakan oleh KPU Jombang dalam menyosialisasikan pemilu 2024 di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Table 1. Rekap Daftar Sosialisasi Tatap Muka oleh KPU Jombang

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	METODE
1	Sosialisasi Peran Perempuan dalam pemilihan Umum Tahun 2024	Jumat, 05 Agustus 2022	Rumah Makan Zam-Zam	Sosialisasi langsung
2	Media Gathering ajak kalangan	Kamis, 6	Rumah	Sosialisasi

	jurnalis untuk sukseskan pemilu 2024	Oktober 2022	makan Zam-Zam	Langsung
3	Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula generasi millennial di Kabupaten Jombang	Senin 19 September 2022	Pendopo Kabupaten Jombang	Sosialisasi langsung
4	SMP Darul Ulum 2 Jombang Kunjungi RPP Gus Dur	Senin, 5 September 2023	Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaen Jombang	Sosialisasi melalui praktek langsung
5	Workshop peningkatan wawasan literasi berbasis inklusi sosial untuk msyarakat	Kamis, 1 September 2023	Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Jombang	Sosialisasi langsung
6	Sosialisasi peran generasi muda dalam demokrasi	Jumat, 19 Agustus 2023	SMA Negeri Mojoagung	Sosialisasi langsung
7	Sosialisasi Pemilih dengan mengikuti karnaval di kecamatan	Senin, 26 Agustus 2023	Sepanjang jalan Kecamatan Ngoro (Rute Karnaval)	Sosialisasi langsung
8	Pengajian sekaligus sosialisasi pemilih	Kamis, 17 Agustus 2023	Mojotengah	Ceramah Agama
9	KPU Goes To Pesantren	Minggu, 22 Oktober 2023	Pondok Pesantren Tebuireng	Sosialisasi langsung
10	KPU Goes To Campus “Nobar Film Kejarlah Janji”	Sabtu, 28 Oktober 2023	UNWAHA dan UNДАР	Sosialisasi langsung
11	Sosialisasi pendidikan pemilih bersama komunitas peternak Jombang	Senin, 11 Desember 2023	Kecamatan Jombang	Tatap Muka langsung
12	Simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024	Selasa, 19 Desember 2023	Kantor KPU Jombang	Sosialisasi langsung
13	Kirab Pemilu: 1 Tahun menjelang hasi pemungutan suara “Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa”	Selasa 05 September 2023 s/d 12 September 2023	Alun-Alun Jombang, serta tiap Kecamatan	Sosialisasi langsung
14	Sosialisasi pendidikan pemilih SMPN 2 Sumobito	Kamis, 21 September 2023	Kantor KPU Jombang	Sosialisasi langsung
15	Simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024	Rabu, 31 Januari 2024	Kantor KPU Jombang	Sosialisasi langsung
16	Sosialisasi pemilih disabilitas	Kamis 01 Februari 2024	Kantor KPU Jombang	Sosialisasi Langsung
17	Sosialisasi Pemilih di Lokasi Khusus Pondok Pesantren	Jum’at, 02 Februaari 2024	Kantor KPU Kabupaten	Sosialisasi langsung

			Jombang	
18	Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Siswa SMP Islam Terpadu Misykat Al-Anwar	Rabu, 16 Februari 2023	Kantor KPU Jombang	Sosialisasi langsung
19	Sosialisasi dan Evaluasi Daerah Pemilihan Dan alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dalam Pemilu 2024	Selasa, 4 April 2023	Kantor Kecamatan Jogoroto	Sosialisasi langsung
20	Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Senin, 17 April 2023	Kantor KPU Jombang	Sosialisasi langsung

Berdasarkan data di atas, dapat kita peroleh bahwa sosialisasi terhadap pemilih pemula terutama pada pelajar sering dilakukan oleh KPU Jombang baik melalui undangan dengan menghadirkan KPU ke sekolah-sekolah atau pihak sekolah yang kemudian melakukan kunjungan ke KPU Jombang. Dalam melakukan sosialisasi tersebut, KPU Jombang menggunakan metode sosialisasi dengan simulasi dan memberikan materi. Narasumber juga menjelaskan bahwa tidak ada kriteria khusus antara sekolah yang diundang KPU dengan sekolah yang mengundang KPU. Sosialisasi yang dilaksanakan terhadap pemilih pemula terutama kaum pelajar dilaksanakan secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang yakni 21 kecamatan.

Selain pemilih pemula, KPU Jombang juga melaksanakan sosialisasi pada kelompok minoritas yakni kelompok disabilitas. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan metode atau treatment khusus pada mereka yang memiliki keistimewaan seperti tuna rungu, tuna netra, tuna daksa dan lain-lain. Diharapkan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU dapat mendorong pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga jumlah partisipasi politik pada pemilu 2024 dari kelompok disabilitas dapat meningkat dibandingkan dengan partisipasi politik pada pemilu sebelumnya.

Sosialisasi juga dilaksanakan pada kelompok mahasiswa sebagai *agent of change*. Narasumber menampakan bahwa sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai metode, salah satunya adalah dengan melalui metode FGD (Forum Group Discussion), pemberian poster-poster kepemiluan serta dengan metode pemutaran film. Pemutaran film ini menjadi salah satu cara atau metode baru yang dilakukan oleh KPU agar timbul perasaan ketertarikan dari mahasiswa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilu dan seberapa pentingnya kepedulian terhadap pelaksanaan pemilu. Film tersebut berjudul *Kejarlah Janji* yang diputar secara serentak di beberapa kampus di seluruh Indonesia bersamaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

3. Optimalisasi Iklan Kerja Sama

KPU Jombang juga melaksanakan optimalisasi terhadap iklan kerja sama antara lain adalah melalui billboard, radio, majalah. Selain itu KPU Jombang juga memaksimalkan media lokal dan website KPU dalam memberikan informasi kepemiluan. Billboard yang dimaksud terletak di beberapa titik pusat kota di Kabupaten Jombang, antara lain di Kebon Rojo dan Perempatan Tugu. Kemudian melaksanakan siaran langsung melalui radio Suara Jombang dengan nama program pojok demokrasi setiap pukul 9 pagi.

B. Peran Kolaboratif KPU Jombang dan *Stakeholders* dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jombang

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu

barometer keberhasilan pemilu di suatu daerah. Keberhasilan tersebut meliputi keterlibatan elemen-elemen di masyarakat itu sendiri yaitu *stakeholders*. *Stakeholders* pertama adalah peran kolaboratif KPU Jombang dan partai politik. Dalam melaksanakan pemilu, narasumber sebagai calon legislatif dari salah satu partai politik menjelaskan bahwa dalam mendapatkan suara pada pemilu adalah dengan melaksanakan strategi politik kehadiran. Strategi ini dilakukan sebagai cara untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan hal ini, masyarakat akan terdorong untuk menggunakan hak suaranya. Narasumber yang notabennya sebagai tim sukses salah satu partai politik di Kabupaten Jombang juga menjelaskan bahwa dalam mendapatkan suara, tehnik yang ia lakukan adalah dengan menggandeng organisasi – organisasi pelajar yang berada di daerah tersebut. Hal yang dilakukan adalah dengan memberikan kontribusi penuh berupa janji untuk memperbaiki jalan, serta memberikan anggaran pada salah satu organisasi.

Stakeholders kedua adalah adanya peran media. Dalam pelaksanaan pemilu 2024, peran kolaboratif antara KPU Jombang dan media adalah adanya kerja sama berupa pemberian biaya pada beberapa berita, serta adanya keterlibatan media dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Jombang. Media dalam hal ini bukan hanya berita online, melainkan media lain seperti media cetak koran, majalah. Kemudian memanfaatkan kerja sama dengan radio, kerja sama dengan kominfo dan sebagainya yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan pemilu di Kabupaten Jombang. Ini menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya partisipasi politik karena adanya informasi yang disebar oleh media.

Stakeholders ketiga berkolaboratif dengan kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas merupakan kelompok yang menjadi perhatian khusus dari KPU Jombang. Namun, narasumber yang merupakan anggota dari kelompok IPC (Ikatan Penyandang Cacat) menjelaskan bahwa KPU Jombang tidak memberikan sosialisasi yang baik seperti pada pemilu sebelumnya. Sosialisasi yang dilaksanakan dengan mengundang disabilitas cenderung mendadak dan tidak terencana serta ditemukan beberapa pemilih yang seharusnya bukan pemilih disabilitas justru dikategorikan menjadi pemilih disabilitas. Hal ini menggambarkan bahwa kerja sama antara KPU Jombang dan kelompok disabilitas tidak berjalan lancar.

Selanjutnya, bentuk kolaboratif lain adalah antara KPU Jombang dan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu tempat yang menjadi sasaran dalam pendirian TPS Lokasi Khusus. Bentuk kerja sama dari KPU Jombang dengan pondok pesantren adalah adanya kemauan dan support dari pondok pesantren dalam pendirian TPS Lokasi Khusus. Selain itu, adanya keterbukaan dari pondok pesantren dalam salah satu tahapan daftar pemilih yakni layanan pindah memilih. Layanan pindah memilih sebagian besar adalah dari pondok pesantren karena beberapa pondok pesantren memberikan izin untuk memulangkan santri pada pelaksanaan pemilu. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pondok pesantren berpengaruh pula dalam meningkatnya partisipasi politik pada pemilu 2024 di Kabupaten Jombang.

Adapun dari pihak lain yakni kepolisian dimana kepolisian menjadi salah satu *stakeholders* dibidang keamanan. Kepolisian membantu KPU dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat selama pelaksanaan pemilu berlangsung. Selain itu, peneliti juga menemukan adanya kontribusi kepolisian dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kontribusi tersebut adalah adanya program makan gratis setelah pencoblosan. Masyarakat Kabupaten Jombang cukup menunjukkan bukti berupa jari yang telah dicelupkan ke dalam tinta. Program tersebut cukup disambut hangat oleh masyarakat Kabupaten Jombang dan mendorong masyarakat untuk datang ke TPS pada hari pencoblosan.

C. Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi Yang Diberikan Oleh KPU Jombang dan Stakeholders dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Jombang

Dari penjelasan di atas, KPU Jombang telah bekerja sama dengan beberapa stakeholders. Bentuk kerja sama tersebut sangat beragam yang notabennya memiliki tujuan yang sama yakni untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Maka dari itu, perlu kita ketahui bagaimana respon dari masyarakat atas Sosialisasi yang diberikan oleh KPU Jombang dan stakeholders. Peneliti mencari data dari beberapa segmentasi masyarakat antara lain; pemilih pemula, kelompok disabilitas, mahasiswa dan salah satu follower sosial media KPU Jombang. Mereka dipilih karena pemilih pemula sebagai pemilih yang baru saja menggunakan hak suaranya atau baru saja memiliki hak suara. Kelompok disabilitas juga merupakan kelompok minoritas, mahasiswa sebagai agent of change, serta follower dimana KPU Jombang yang aktif dalam memanfaatkan sosial media.

Peneliti menemukan data bahwa dari beberapa segmentasi tersebut memberikan respon yang positif. Mereka mengikuti sosialisasi dari KPU Jombang dengan baik. Seperti pemilih pemula yang mau untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Meskipun, dasar dari penggunaan hak suara tersebut bukan berdasarkan hati nurani, melainkan karena adanya “amplop” yang ia dapatkan. Lain dari pemilih pemula, dari persepektif mahasiswa, ia ternyata juga merupakan salah satu anggota KPPS. Hal tersebut menggambarkan bahwa ia bukan hanya aktif sebagai pemilih namun juga aktif sebagai penyelenggara. Didukung dengan data dari follower sosial media KPU Jombang yang berperan aktif dalam mengikuti sosial media, sehingga ia terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024.

Namun, dari perspektif kelompok disabilitas, dimana sosialisasi yang ia dapatkan tidak berjalan maksimal. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang seharusnya mereka dapatkan, tidak mereka dapatkan. Narasumber menjelaskan hal tersebut terjadi karena saat sosialisasi dilaksanakan, sosialisasi cenderung mendadak. Serta selama berlangsungnya sosialisasi tidak ada penerjemah, sehingga untuk kelompok tuna rungu dan tuna netra mengalami kesulitan.

D. Interaksionisme Simbolik Peran KPU Jombang dan Stakeholders dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jombang

Interaksionisme simbolik ialah terjadinya sebuah interaksi sosial dengan adanya simbol-simbol yang memiliki makna. Menurut Mead interaksionisme simbolik ialah makna yang berasal dari sebuah proses interaksi. Dalam proses interaksi pada teori interaksionisme simbolik, Mead memusatkan perhatiannya pada tindakan manusia saat berinteraksi melalui simbol-simbol yang terjadi (Febriyanti 2024). Dalam Tazid (2020) Mead mengidentifikasi lima tahap tindakan individu melalui stimulus dan respon, diantaranya: (a) Stimulus adalah suatu rangsangan yang timbul dari tindakan, (b) Impuls adalah adanya penerimaan dari alat indera atas stimulus yang diberikan, (c) Persepsi adalah kapasitas individu dalam membuat persepsi, (d) Manipulasi adalah suatu proses dalam menimbang atau menilai dari persepsi yang telah dibuat, (e) Konsumsi adalah suatu proses dari sebuah tindakan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana seorang pemilih dalam pemilu 2024 menggunakan hak pilihnya. KPU Jombang dalam hal ini merupakan penyelenggara pemilu telah memberikan suatu rangsangan atau dorongan dalam bentuk sosialisasi. Kemudian, akan ada proses dalam melakukan suatu tindakan dari individu atas stimulus yang diberikan.

1. Respon Pemilih Setelah Mendapatkan Sosialisasi

Dalam teori yang dikemukakan oleh Mead, suatu tindakan individu dipengaruhi oleh rangsangan atau dorongan dari luar individu. Dalam

penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan salah satunya yakni dorongan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS. Dorongan tersebut terlihat dari kalimat “Ayo datang ke TPS”, “Gunakan hak pilihmu” dan bentuk sosialisasi lainnya. Dorongan inilah yang disebut dengan stimulus atau rangsangan. Stimulus ini akan mempengaruhi keputusan individu dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam proses sosialisasi dari KPU Jombang serta peran kolaboratif KPU Jombang dengan *stakeholders* memberikan stimulus dengan mempengaruhi pikiran (*mind*) dari pemilih. Pemilih yang dalam hal ini sebagai objek sosialisasi akan dipengaruhi oleh simbol-simbol atas sosialisasi yang didapatkan. Pemilih kemudian akan merefleksikan dirinya sebagai objek (pemilih yang mendapat sosialisasi) dan narasumber (pemilih di TPS). Gagasan ini yang dinamakan sebagai diri (*self*) yakni individu akan berusaha merefleksikan dirinya dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Diri muncul dan berkembang jika terjadi komunikasi sosial atau komunikasi antarmanusia. Diri berhubungan secara dialektis dengan *mind* (pikiran) (Kurniawan et al. 2023).

Kemudian adanya masyarakat (*society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku (tindakan) yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. Ketiga hal ini yang pada akhirnya mempengaruhi tindakan individu sebagai pemilih.

Apabila KPU Jombang sebagai penyelenggara pemilu telah memberikan stimulus atau dorongan terhadap pemilih berupa sosialisasi. Maka perlu diketahui pula bagaimana respon dari pemilih atas sosialisasi tersebut. Setelah mendapatkan sosialisasi, pemilih akan mendapatkan informasi mengenai kepemiluan. Informasi tersebut didapatkan dari alat indera berupa melihat, mendengarkan dan mempraktekkan. Kondisi ini yang disebut sebagai impuls yakni penerimaan individu melalui alat indera. Hal tersebut terlihat dari pemilih yang dapat menjelaskan kapan, dan dalam kegiatan apa pemilih mendapatkan sosialisasi dari KPU Jombang.

Namun hal berbeda dialami oleh pemilih disabilitas dimana informasi yang didapatkan tidak dapat maksimal. Narasumber mengungkapkan bahwa perlu pihak ketiga dalam menyampaikan maksud dan tujuan serta isi materi selama sosialisasi berlangsung. Hal tersebut mengakibatkan proses impuls tidak dapat berjalan maksimal. Kendati demikian, pemilih disabilitas dapat menjelaskan informasi-informasi dasar yang dijelaskan oleh KPU saat sosialisasi berlangsung. Informasi dasar tersebut seperti hak-hak dari pemilih disabilitas, kemudian berapa surat suara yang harus dicoblos, dan apa yang dilakukan di dalam bilik suara. Pernyataan ini juga sejalan dengan pemilih lainnya. Mereka secara singkat dapat menjelaskan isi dari materi yang disampaikan oleh KPU Jombang. Ditahap inilah yang disebut sebagai tahap persepsi.

Pemilih dapat menjelaskan hal-hal dasar dari keseluruhan materi. Kemampuan pemilih hanya menjelaskan hal-hal dasar ini disebabkan oleh stimulus atau rangsangan tidak diterima seluruhnya oleh alat indera. Respon yang diberikan oleh pemilih telah mengalami penyesuaian atau yang menarik pemilih. Respon yang diberikan juga akan dipengaruhi oleh faktor dari luar. Sehingga persepsi atas stimulus yang telah diterima melalui alat indera akan menyesuaikan dengan kondisi individu serta komunikasi dari luar individu.

Tahap ketiga adalah manipulasi. Setelah impuls terjadi serta persepsi terhadap objek dapat dipahami, maka langkah selanjutnya adalah memanipulasi objek atau mengambil tindakan berkenaan dengan objek itu. Keputusan yang akan diambil

berdasarkan persepsi atas impuls yang terjadi. Tahap manipulasi merupakan tahap jeda yang penting dalam proses tindakan agar tanggapan tidak diwujudkan secara spontan (Febriyanti 2024). Pada tahap ini pemilih memproses dirinya dalam menentukan hak suaranya. Pemilih akan dihadapkan selain pada dirinya sendiri, KPU yang memberikan sosialisasi juga pihak lain yang mempengaruhi suaranya. Hal tersebut terlihat dari pemilih yang menggunakan hak suaranya untuk memilih calon legislatif berdasarkan money politik. Pemilih mengungkapkan bahwa ia memilih dikarenakan telah mendapatkan “amplop” dari perwakilan calon. Selain itu, dikarenakan banyaknya nama yang mencalonkan diri, serta banyaknya surat suara mengakibatkan pemilih justru kesulitan. Sehingga hak suara tidak dimanfaatkan secara maksimal. Mereka lebih memilih calon-calon secara random daripada mencari tahu satu persatu visi dan misi dari calon tersebut. Namun, tidak semua pemilih demikian. Ada beberapa pemilih yang justru benar-benar menggunakan hak suaranya, dengan mencari tau calon tersebut.

Tahap selanjutnya disebut sebagai tahap konsumsi. Tahap konsumsi yang disebut juga dengan tahap pelaksanaan ini merupakan dorongan hati yang sebenarnya. Tahap keempat ini merupakan tindakan berdasarkan pada dorongan manusia dengan tujuan untuk memuaskan hati. Jadi pada tahap keempat ini yaitu suatu dorongan atas persepsi dan keputusan yang diambil. Setelah melewati beberapa pertimbangan, manusia akan memutuskan untuk mengambil tindakan selanjutnya (Febriyanti 2024)

Dalam tahap konsumsi, pemilih akan menentukan hak suaranya di dalam bilik suara. Pemilih menjelaskan bahwa ia menggunakan hak pilihnya. Pemilih tidak ada yang menganut golongan putih atau golput. Mereka menjelaskan bahwa surat suara yang mereka coblos berjumlah lima surat suara yakni surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Presiden wakil presiden.

Namun, pada pemilih disabilitas mengalami beberapa kesulitan. Mereka menjelaskan bahwa beberapa pemilih disabilitas memilih untuk menjadi golongan putih dikarenakan akses yang terbatas. Sebagai contoh adalah para kelompok tuna netra yang tidak dapat menggunakan hak suaranya secara maksimal karena KPU tidak menyediakan surat suara braille. Mereka juga mengungkapkan, karena akses tempat pemungutan suara juga tidak maksimal mengakibatkan para pemilih disabilitas memutuskan untuk tidak datang ke TPS. Sehingga didapatkan partisipasi politi pada kelompok disabilitas di Kabupaten Jombang cenderung kecil yakni sebesar 10%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilu 2024 merupakan sarana dalam menentukan pemimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan. Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana peran KPU Jombang dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Jombang melalui sosialisasi. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan rangsangan atau dorongan kepada para pemilih yang dikena sebagai stimulus. Didapatkan hasil bahwa KPU Jombang menggunakan dua metode sosialisasi yaitu sosialisasi tatap muka dan sosialisasi melalui media sosial.

Selanjutnya adanya peran kolaboratif antara KPU Jombang dengan *stakeholders* sebagai berikut: Pertama kolaboratif dengan partai politik dimana partai politik menggunakan metode politik kehadiran dalam pelaksanaan kampanye dan menggunakan organisasi masyarakat sebagai salah satu alat dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Selanjutnya kolaboratif dengan media di mana adanya kerja sama antara KPU Jombang dengan media untuk membagikan informasi kepemiluan yang valid. Kemudian kolaboratif dengan kelompok disabilitas

dimana peran kolaboratif ini tidak dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, kolaboratif dengan pondok pesantren melalui pendirian TPS lokasi khusus. Dan yang terakhir kolaboratif dengan kepolisian melalui pengamanan dalam tahapan serta mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya melalui program makan gratis.

Selanjutnya, didapatkan pula respon pemilih atas sosialisasi tersebut melalui empat tahapan yaitu; (a) Impuls berupa penerimaan indera oleh pemilih, (b) Pemilih membuat persepsi atas stimulus yang diberikan melalui alat indera, (c) Pemilih mempertimbangkan hak suara dalam pemilu 2024. Dalam proses ini, pemilih akan dihadapkan pada persepsi dirinya sendiri, sosialisasi dari KPU Jombang, serta masyarakat di luar dirinya. Sehingga didapatkan beberapa pemilih menggunakan hak pilihnya atas dasar adanya money politik atau yang mereka sebut sebagai “amplop” dari calon, (d) Pemilih menentukan hak suaranya. Dalam hal ini pemilih disabilitas mengalami kesulitan dalam akses saat berada di TPS, misalnya tidak ada surat suara braille sehingga mengakibatkan kelompok disabilitas tidak maksimal dalam menggunakan hak suaranya. Namun, pemilih lainnya menggunakan hak pilihnya dengan baik, meskipun beberapa dari mereka mengaku memilih tanpa mencari tahu terlebih dahulu visi dan misinya.

Peneliti berharap penelitian ini dapat mendorong kesadaran masyarakat agar lebih sadar terhadap pelaksanaan pemilu khususnya di Kabupaten Jombang. Sehingga tidak hanya dari KPU Jombang dan *stakeholders* saja yang aktif, melainkan masyarakat yang juga turut aktif dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mampu menjelaskan peran kolaboratif KPU Jombang dan *stakeholders* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai aspek yang lain yaitu bidang ekonomi dan hukum.

Daftar Pustaka

- Adnyanaesa, Pandeia Bagus, and I. Wayan Utama. 2023. “Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda.” *Jurnal Dikemas (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 7(1):23–27.
- Agung, Anak, Istri Riskhanna, Indira Nakula, Anak Agung, Sagung Laksmi, and Luh Putu Suryani. 2023. “Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 ‘ Studi Kasus Di Kabupaten B Adung .” 4(2):137–42.
- Dewi, Lintang Yunisha, Hizkia aritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, and Nur Widiyasono. 2022. “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput.” *Jurna Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8(1):36–47. doi: 10.37058/jipp.v8i1.4082.
- Dwi, Thereza, Ningrum Siburian, Putri Lopiga, Br Tarigan, Devi Sri Wahyuni, and Daniel R. Sihite. 2024. “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Medan.” 3:9736–41.
- Febriyanti. 2024. “Stereotip Mahasiswi Bercadar Di Ingkungan Institut Agama Islam Negeri Kediri.” 16–21.
- Iswanto, Denny, and Dewi Bayu Pamungkas. 2024. “Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2024: Pendekatan *Stakeholders* Mapping Analysis.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6(1):15–27.

- Kurniawan, Randi Rizky, Sri Wahyuni, Nanik Rahmawati, Jurusan Sosiologi, Universitas Maritim, and Raja Ali. 2023. "Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang." 3:9179-92.
- Langkun, Febry James, Dani R. Pinasang, and Sondakh Jemmy. 2023. "Analisis Juridis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara." *Jurnal Tana Mana* 4(1):219-36.
- Mursyid, Saadillah, and Dea Larissa. 2021. "PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKIF SIYASAH SYAR'IAH." *Siyasatuna* 2(2):442-53.
- Sonianto, and Prilian Ayu Minarni. 2023. "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN BADAN ADHOC (PPK) MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) (Studi Kasus: KPU Kab. Lampung Tengah)." *Technologia* 14(4):419-24.
- Supriyatno, Helmi. 2019. "Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Di Jombang Capai 83 Persen." *Harian Bhirawa*. Retrieved (<https://www.harianbhirawa.co.id/partisipasi-masyarakat-pada-pemilu-di-jombang-capai-83-persen>).
- Suwardyanba, Gede Irfan, and I. Made Chandra Mandira. 2024. "Peran Media Cetak Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Kesiman Petilan Pada Pemilihan Umum 2024." 5(1):1115-20.
- Syahrum, Salim &. 2012. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.Pdf*. edited by Haidir. Bandung: Citapustaka Media.
- Tambun, Jones, Frendianus J. R. Zebua, and Amsal Franky H. Tambun. 2024. "DISEMINASI INFORMASI KPU DAN BAWASLU DALAM MENSUKSESKAN PEMILU 2024." *Journal f Communication Studies* 01(01):25-33.
- Tazid, Abu. 2017. *Tokoh, Konsep dan Kata Kunci Teori Postmodern*. Yogyakarta:Deepublish.
- _____. 2020. *Interrelasi Disiplin Ilmu Sosiologi:Catatan Kunci dan Ikhtisar Teoritik*. Surabaya:Jakad Media Publishing.
- _____. 2024. *Modal Social dan Civil Society*. Solok:Mafy Media Literasi Indonesia.
- Widiarto, Sigit. 2024. "Komunikasi Politik Dan Pemilu 2024: Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Menuju Pemilu Yang Bermartabat." 29:136-42. doi: 10.19109/intizar.v29i2.20167.
- Yusuf, M. 2010. "PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENDIDIKAN POLITIK." *GaneC Swara* 4(1):13-16.